

PENGESAHAN IDENTITAS DALAM ASPEK HUKUM PADA PENETAPAN BEDA NAMA STUDI KASUS PERDATA NOMOR 43/PDT.P/2024/PN.TMG

Dwanda Julisa Sistyawan*, Nadya Dhea Fristianti, Sarkanto*****

Fakultas Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam INISNU Temanggung *,***

Jalan Suwandi Suwardi No 1 Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia

Lembaga Bantuan Hukum Sardja Hadi Sardjana, Temanggung**

Jalan Gajah Mada No 6 Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia

disampaikan September 2024 – ditinjau Mei 2025 – diterima Juni 2025

Abstract

The issue of legal identity plays a crucial role in legal and administrative processes, particularly when discrepancies arise in naming individuals, as seen in Case No. 43/Pdt.P/2024/PN Tmg involving Sabar and Sabar Widodo. This research adopts a normative juridical approach to analyze the legal principles surrounding establishing identity in official documents. Primary data were obtained from legal case files, while secondary data were gathered through literature reviews. The findings highlight that ambiguities in legal identity can lead to significant challenges, including inheritance rights disputes and administrative misrecognition. The case emphasizes the need for clear and accurate legal identities to ensure legal certainty and protect individual rights. The research underscores the importance of integrating digital signature technology and forensic linguistic expertise in verifying the authenticity of legal documents and identities. The court's decision to declare that Sabar and Sabar Widodo refer to the same individual underscores the broader significance of identity clarity in legal contexts. This case reflects the need for legal reforms, including adopting modern digital tools to streamline the verification of identities and prevent potential disputes. The study highlights the necessity of a coherent legal framework to safeguard individual rights and ensure smooth administrative and legal procedures.

Keywords: *Identity Verification; Legal Certainty; Legal Identity, Name Discrepancy.*

Intisari

Masalah identitas hukum memainkan peran penting dalam proses hukum dan administrasi, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian dalam penamaan individu, seperti yang terlihat dalam Kasus No. 43/Pdt.P/2024/PN.Tmg yang melibatkan Sabar dan Sabar Widodo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk

*Alamat korespondensi: dwanda.js@gmail.com

**Alamat korespondensi: nadyadheaf@gmail.com

***Alamat korespondensi: sarkantoedo@gmail.com

menganalisis prinsip-prinsip hukum terkait penetapan identitas dalam dokumen resmi. Data primer diperoleh dari berkas kasus hukum, sementara data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan identitas hukum dapat memicu tantangan signifikan, termasuk sengketa hak waris dan kesalahan administratif. Kasus ini menekankan pentingnya identitas hukum yang jelas dan akurat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak individu. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya teknologi tanda tangan digital dan keahlian linguistik forensik dalam memastikan keabsahan dokumen hukum serta verifikasi identitas. Keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa Sabar dan Sabar Widodo merujuk pada individu yang sama menegaskan signifikansi lebih luas dari kejelasan identitas dalam konteks hukum. Kasus ini mencerminkan perlunya reformasi hukum, termasuk adopsi alat digital modern untuk memperlancar verifikasi identitas dan mencegah potensi sengketa. Studi ini pada akhirnya menekankan pentingnya kerangka hukum yang koheren untuk melindungi hak individu dan memastikan kelancaran proses administrasi serta hukum.

Kata Kunci: Identitas Hukum; Kepastian Hukum; Ketidaksesuaian Nama; Verifikasi Identitas.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern, identitas hukum yang akurat dan jelas sangat penting untuk memastikan akses terhadap hak, layanan, dan perlindungan hukum. Ketidakjelasan identitas dalam dokumen resmi dapat menyebabkan masalah signifikan, seperti yang terlihat dalam Kasus Nomor 43/Pdt.P/2024/PN.Tmg. Ketidakpastian ini tidak hanya mempengaruhi validitas dokumen, tetapi juga hak-hak hukum individu yang terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa identitas hukum yang jelas berfungsi sebagai landasan untuk berbagai interaksi sosial dan administratif serta menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik dan perlindungan hukum yang efektif.¹

Identitas hukum memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk persiapan dokumen resmi dan proses administrasi. Kasus Sabar dengan Nomor Kasus 43/Pdt.p/2024/PN.Tmg menggarisbawahi pentingnya memastikan

¹ Sperfeldt, Cristoph, "Digital Exclusions: Legal Identity, Identification, and the Sustainable Development Goals in Southeast Asia", *Paper*, Faculty of Law University of Copenhagen, Denmark, 9 December 2023, hlm. 1-20.

representasi identitas hukum yang jelas dan akurat dalam dokumen resmi untuk menghindari masalah seperti ambiguitas nama. Identitas hukum sangat penting untuk mengakses hak, layanan, dan perlindungan, seperti yang disorot dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan identitas hukum bagi semua pada tahun 2030.²

Proses administrasi dan penyusunan dokumen resmi dalam penggunaan tanda tangan memiliki peran krusial. Identifikasi tanda tangan merupakan langkah penting dalam otentikasi dokumen administrasi dan resmi di mana tingkat akurasi dalam proses identifikasi ini sangat diperlukan.³ Selain itu, dalam konteks pengembangan sistem informasi arsip dokumen, terdapat pergeseran dari penggunaan dokumen fisik menuju dokumen digital yang memungkinkan pengiriman melalui media sosial, seperti WhatsApp dan Telegram.⁴ Permasalahan ini menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam memfasilitasi proses administrasi yang efisien.

Kasus yang dialami oleh Sabar terkait ketidakjelasan terkait nama dalam dokumen resmi dapat menciptakan hambatan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini menekankan pentingnya keakuratan dan kejelasan identitas hukum seseorang dalam dokumen-dokumen resmi. Dalam konteks penanganan kasus seperti ini, implementasi metode *Business Process Reengineering* (BPR) dapat membantu mengidentifikasi alur kerja sistem yang sedang berjalan dan menciptakan solusi berbasis web guna mempercepat proses administrasi terkait data penduduk.⁵

² *Ibid.*

³ Mutiara Sarahwaty Simanjuntak, "Identifikasi Tanda Tangan Menggunakan Metode Fitur Ekstraksi Biner Dan K Nearest Neighbor", *CSRID (Computer Science Research and Its Development Journal)*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 191.

⁴ Muhammad Haries, "Sistem Informasi Arsip Dokumen Berbasis PHP MySQL Pada Kantor Camat Nisam Antara", *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 22, No. 1, 2024, hlm. 10–17.

⁵ Muhammad Arip Islahudin dan Wiwien Hadikurniawati, "Implementasi Metode Business Process Reengineering (BPR) Pada Sistem Pelayanan Data Penduduk", *Jurnal Ilmiah Informatika*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 25–34.

Selain itu, aspek legalitas dokumen juga menjadi hal yang krusial dalam menangani kasus identitas hukum. Pemeriksaan integritas dokumen dengan menggunakan algoritma tanda tangan digital dapat memastikan keabsahan dokumen tersebut.⁶ Dalam hal ini, kejelasan identitas hukum seseorang dalam dokumen resmi menjadi landasan yang sangat penting dalam memastikan validitas dan keabsahan dokumen tersebut.

Pengadilan dalam kasus Sabar diminta untuk menentukan bahwa nama Sabar dan Sabar Widodo mengacu pada individu yang sama untuk mencegah potensi kebingungan dan ambiguitas hukum. Keahlian ahli bahasa forensik dapat sangat berharga dalam memberikan bukti yang relevan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁷

Permohonan yang diajukan oleh Sabar dan Widani Safitri bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas tertentu. Dalam konteks ini, permohonan tersebut dapat dikaitkan dengan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum terkait hak waris di masa yang akan datang. Sebagai contoh, dalam kasus di Pengadilan Agama Bandung, permohonan untuk menjadi wali dan mengurus harta waris anak yang dikabulkan menunjukkan pentingnya proses hukum untuk mencapai kepastian hukum terkait hak-hak anak.⁸

Secara keseluruhan, proses hukum yang terstruktur dan jelas sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak atas warisan diakui dan dilindungi. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi anak-anak, tetapi juga mencegah potensi

⁶ Diki Arisandi, Moh Baharudin Yusuf, dan Sukri Sukri, "Pemeriksaan Integritas Dokumen Dengan Digital Signature Algorithm", *JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering)*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1.

⁷ Patrick Sadi Makangila dan Yesdauletova Sabira, "The Forensic Analysis of Likelihood of Confusion among Brand Names: Case of Adidas and Abidas", *Journal for the Study of English Linguistics*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 129.

⁸ Rahmadi Indra Tektona dan Savitri Indiarti, "Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/Pa.Bdg)", *EGALITA*, Vol. 16, No. 1, 2021, hlm. 24-39.

sengketa di masa depan yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengadilan dan lembaga pertanahan untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang transparan dan adil dalam pengelolaan hak waris.⁹

Kajian terhadap permohonan perubahan nama diri telah menjadi perhatian sejumlah peneliti dalam ranah hukum perdata di Indonesia. Alfahera Fahmi dalam penelitiannya yang berjudul “Pertimbangan Hakim atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Tjk)” menekankan bahwa proses perubahan nama memerlukan tahapan formal yang ketat, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti sah, hingga persidangan, dengan hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pemohon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, serta menegaskan pentingnya prosedur formal dalam mewujudkan kepastian hukum.¹⁰

Selain itu, Abdulah Rafi Utomo dalam tulisannya berjudul “Analisis Hukum Perdata terhadap Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang” menganalisis perubahan dan penambahan nama dalam perspektif hukum perdata. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perubahan maupun penambahan nama harus dilakukan melalui permohonan ke pengadilan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam hukum perdata, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia.¹¹

⁹ Suprima, Wardani Rizkianti, dan Khoirur Rizal Lutfi, “Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”, *Esensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 109–18.

¹⁰ A. Fahmi, “Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN. Tjk)”, *YUSTISI*, Vol. 12, No. 2, hlm. 249–255

¹¹ Abdulah Rafi Utomo, “Analisis Hukum Perdata Terhadap Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang”, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17, July 30, 2024, hlm. 382–386.

Kedua penelitian tersebut menjadi landasan penting bagi penulis untuk mendalami topik serupa dengan fokus, konteks, atau sudut pandang yang berbeda. Artikel yang diajukan ini menyajikan analisis yang orisinal dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait perubahan nama diri.

Penetapan ini penting untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi data dalam berbagai dokumen resmi yang tidak hanya berdampak pada administrasi personal, tetapi juga pada hak-hak hukum yang terkait. Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan identitas dalam aspek hukum dan administrasi serta peran pengadilan dalam menyelesaikan persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana ketidakjelasan identitas dalam dokumen resmi pada Kasus Nomor 43/Pdt.p/2024/PN.Tmg mempengaruhi validitas nama Sabar dan Sabar Widodo serta hak-hak hukum terkait.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan *case study* atau studi kasus, dalam hal ini pada Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2024/PN.Tmg. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk memahami dasar-dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menetapkan identitas seseorang dalam dokumen resmi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen resmi terkait kasus tersebut, seperti akta kelahiran, akta nikah, akta cerai, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui kajian literatur hukum yang mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum yang terkait dengan topik identitas hukum. Analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan kasus hukum

terkait untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum dalam konteks penetapan identitas. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran pengadilan dalam memastikan kejelasan identitas hukum seseorang, serta implikasi hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan identitas dalam dokumen resmi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kronologi Kasus

Kasus dengan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN.Tmg melibatkan dua pemohon, Sabar dan Widani Safitri, yang meminta pengadilan untuk menetapkan bahwa nama Sabar dan Sabar Widodo adalah identitas dari orang yang sama. Pemohon I, Sabar, memiliki dua nama yang tercatat dalam berbagai dokumen resmi. Awalnya, Sabar hanya memiliki satu nama, tetapi kemudian namanya ditambahkan menjadi Sabar Widodo oleh orang tuanya karena sering sakit-sakitan, dengan harapan nama tersebut membawa keberuntungan.

Ketidakcocokan nama ini menyebabkan masalah administratif, terutama ketika Sabar hendak pensiun, di mana nama yang digunakan dalam berbagai dokumen berbeda. Permasalahan ini juga mempengaruhi dokumen milik anaknya, Pemohon II, Widani Safitri, yang tercatat dengan nama ayah Sabar Widodo. Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Temanggung untuk menetapkan bahwa kedua nama tersebut merujuk pada orang yang sama untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan kepastian hukum. Pengadilan setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan bahwa Sabar dan Sabar Widodo adalah orang yang sama.¹²

¹² Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 43/Pdt.P/2024/PN.Tmg, hlm.1-12.

2. Aspek Legalitas dan Administrasi

Pengesahan identitas dalam aspek hukum pada penetapan beda nama, seperti yang tercantum dalam Kasus Perdata Nomor 43/Pdt.P/2024/PN.Tmg merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek hukum yang terlibat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengesahan identitas dan perubahan nama sering kali berkaitan dengan keabsahan dokumen dan perlindungan hukum bagi individu yang melakukan perubahan tersebut. Menurut Idrus, nama merupakan atribut yang sangat pribadi dan memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang sehingga perubahan nama dianggap sebagai peristiwa penting dalam administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perubahan dan penambahan nama harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku untuk menjaga keabsahan identitas.¹³

Selanjutnya, dalam konteks pengesahan identitas, aspek hukum pidana juga dapat berperan, terutama jika terdapat indikasi penipuan atau penggunaan identitas palsu. Penelitian mengenai tindak pidana penipuan yang menggunakan identitas dokter menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada harus mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan identitas.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan identitas tidak hanya berkaitan dengan aspek perdata, tetapi juga harus mempertimbangkan implikasi pidana yang mungkin timbul dari perubahan identitas.

Lebih jauh, perubahan nama yang tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan masalah hukum, termasuk dalam konteks perjanjian dan kontrak. Sebagai contoh, identitas palsu dalam perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan

¹³ Agung Triyanto Nuriman Idrus, Weny Almoravid Dungga, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan", *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm. 1169–1176.

¹⁴ Tigor Ahmad Thabrani Simanjuntak, "Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Dokter (Studi Putusan Nomor 192/Pid/2023/Pt BJM)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 168-177.

berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata yang menyatakan bahwa penipuan dapat membatalkan perjanjian.¹⁵ Oleh karena itu, penting bagi individu yang melakukan perubahan nama untuk memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut dan memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan diikuti untuk melindungi hak-hak mereka.

Aspek pluralisme hukum juga menjadi penting dalam konteks ini di mana masyarakat Indonesia yang beragam memiliki berbagai norma dan hukum yang dapat mempengaruhi pengesahan identitas. Misalnya, dalam beberapa komunitas, norma adat dapat berkontribusi pada cara individu mengubah nama atau identitas mereka, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan hukum negara.¹⁶ Oleh karena itu, pengesahan identitas dalam kasus beda nama harus mempertimbangkan interaksi antara hukum negara dan norma-norma lokal yang berlaku.

Akhirnya, untuk memastikan bahwa proses pengesahan identitas berjalan dengan baik, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami aspek-aspek hukum yang relevan dan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur yang diperlukan telah dipenuhi. Hal ini akan membantu mengurangi potensi sengketa di masa depan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi individu yang melakukan perubahan nama.¹⁷

Kejelasan identitas hukum sangat penting dalam memastikan hak, layanan, dan perlindungan hukum seseorang. Identitas hukum yang jelas juga berkaitan dengan legalitas dokumen dan kepastian hukum, terutama dalam konteks hak waris dan administrasi lainnya. Algoritma tanda tangan digital dapat menjadi solusi yang efektif untuk memverifikasi integritas dokumen, memastikan keabsahan, dan kejelasan

¹⁵ Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 535.

¹⁶ Ikhwannuddin Harahap, “Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan”, *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 43, No. 1, 2019, hlm. 64-78.

¹⁷ Agus Suwandono, “Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak Untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak”, *Abdibahaya*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 1-8.

identitas hukum seseorang dalam dokumen resmi. Tanda tangan digital memainkan peran penting dalam konfirmasi dan otorisasi dalam dokumen hukum, serta transaksi perbankan.¹⁸ Tanda tangan merupakan penanda atau identitas yang ada pada suatu dokumen yang digunakan untuk verifikasi dan legalisasi informasi.¹⁹

Kejelasan identitas hukum merupakan elemen krusial dalam memastikan hak, layanan, dan perlindungan hukum bagi individu. Identitas hukum yang jelas tidak hanya berhubungan dengan pengakuan hak-hak individu, tetapi juga dengan legalitas dokumen yang mereka miliki. Dalam konteks ini, dokumen yang sah dan terverifikasi dapat mengurangi sengketa hukum dan meningkatkan kepastian hukum, terutama dalam hal hak waris dan administrasi lainnya.²⁰

Penerapan tanda tangan digital juga dapat membantu dalam otentikasi dokumen secara efisien dan akurat. Sistem verifikasi tanda tangan otomatis diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen, terutama dalam situasi hukum dan forensik digital.²¹ Selain itu, tanda tangan manual juga tetap penting dalam proses otentikasi, dan telah digunakan secara luas di seluruh dunia.²²

Dalam konteks keamanan, tanda tangan digital dapat diimplementasikan bersama dengan teknologi *biometric*, seperti pengenalan iris untuk meningkatkan sistem otentikasi personal.²³ Selain itu, peningkatan skema *multisignature* dapat

¹⁸ Srikanta Pal, *et al.*, "Off-Line Signature Identification Using Background and Foreground Information", *Paper*, 2011 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications, Australia, 6-8 Desember 2011, p. 672-77.

¹⁹ Jaenal Arifin dan Muhammad Zidny Naf'an, "Verifikasi Tanda Tangan Asli Atau Palsu Berdasarkan Sifat Keacakan (Entropi)", *Jurnal Infotel*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 130.

²⁰ Abdul Kadir Jaelani, *et al.*, "Green Legality Certificate on Agrarian Reform: Indonesian Experience", *Paper*, KnE Social Sciences, 5 January 2024, hlm. 151-157.

²¹ Manas Singhal, Manish Trikha, dan Maitreyee Dutta, "Time Independent Signature Verification Using Normalized Weighted Coefficients", *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, Vol. 6, No. 6, 2016, hlm. 2658.

²² Ekta Narwal dan Sumeet Gill, "Simulating Manual Signature Using Elman Back Propagation Model to Create Pseudo Digital Signature", *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 4548-4551.

²³ Huda M Therar dan Ahmed J Ali, "Personal Authentication System Based on Iris Recognition and Digital Signature Technology", *Journal of Soft Computing and Data Mining*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 1-18.

memberikan keaslian yang diperlukan, terutama dalam situasi hukum dan forensik digital.²⁴

Dalam hal kecepatan verifikasi terdapat metode yang dapat mempercepat proses verifikasi tanda tangan digital, seperti yang diterapkan dalam algoritma kurva eliptik.²⁵ Selain itu, penggunaan *blockchain* juga dapat mendukung skema otentikasi identitas yang menjaga privasi.²⁶ Dengan demikian, penggunaan algoritma tanda tangan digital baik secara manual maupun otomatis dapat memberikan kejelasan identitas hukum yang diperlukan dalam dokumen resmi, transaksi perbankan, dan berbagai konteks hukum lainnya. Implementasi teknologi ini dapat meningkatkan keamanan, keabsahan, dan kejelasan identitas dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

3. Implikasi dan Hak Hak Hukum Para Pemohon

a. Dampak Terhadap Validitas Nama

Dampak terhadap validitas nama dalam dokumen resmi sangat signifikan, terutama ketika ketidakjelasan identitas dapat menyebabkan ambiguitas yang merugikan. Ketidakjelasan ini dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti pendaftaran hak waris, pengakuan identitas dalam dokumen legal atau transaksi finansial. Misalnya, dalam kasus di mana nama Sabar dan Sabar Widodo tidak dijelaskan dengan jelas. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam administrasi hukum dan mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hak-hak hukum individu. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam identitas dapat meningkatkan kebingungan dan mengganggu proses pengambilan keputusan yang pada gilirannya

²⁴ Gauri Shankar, *et al.*, 2023, *Improved Multisignature Scheme for Authenticity of Digital Document in Digital Forensics Using Edward-Curve Digital Signature Algorithm*, Research Result, Security and Communication Networks Advances in AI Related Information Forensics and Security, hlm. 1–18.

²⁵ Adrian Antipa, *et al.*, “Accelerated Verification of ECDSA Signatures”, *Paper*, Proceedings Of The 12th International Conference On Selected Areas In Cryptography, Februari 2006, hlm. 122.

²⁶ Sheng Gao, *et al.*, 2021, *A Privacy-Preserving Identity Authentication Scheme Based on the Blockchain*, Research Result, Security and Communication Networks: Security and Privacy Challenges in Internet of Things and Mobile Edge Computing, 3 Juni 2021, hlm. 1–10.

dapat mempengaruhi validitas nama dan hak-hak yang terkait dengan identitas tersebut.²⁷

Dalam konteks hukum, validitas nama menjadi krusial untuk memastikan bahwa individu dapat diidentifikasi dengan tepat. Ketidakjelasan dalam nama dapat mengarah pada masalah hukum yang lebih besar, termasuk kesulitan dalam mengklaim hak waris atau dalam transaksi yang memerlukan identitas yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami kebingungan identitas cenderung menghadapi masalah psikologis yang lebih besar, seperti kecemasan dan depresi yang dapat memperburuk situasi hukum mereka.²⁸ Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ambiguitas dalam identitas agar setiap individu dapat memiliki akses yang adil terhadap hak-hak hukum mereka.

Lebih jauh lagi, ambiguitas dalam nama juga dapat berimplikasi pada aspek sosial dan psikologis individu. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kebingungan identitas sering kali mencari pengakuan dari orang lain yang dapat memperburuk ketidakpastian yang mereka alami.²⁹ Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan sistem yang jelas dan transparan dalam pengelolaan nama dan identitas sehingga individu dapat merasa aman dan diakui dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya penting untuk validitas hukum, tetapi juga untuk kesejahteraan psikologis individu.³⁰

Secara keseluruhan, dampak dari ketidakjelasan identitas terhadap validitas nama sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu,

²⁷ Kai Hatano, *et al.*, "Trajectories in Sense of Identity and Relationship With Life Satisfaction During Adolescence and Young Adulthood", *Developmental Psychology*, Vol. 58, No. 5, 2022, hlm. 977-989.

²⁸ Hatano, *et al.*, "Identity in Young Adulthood: Links With Mental Health and Risky Behavior", *Journal of Applied Developmental Psychology*, Vol. 58, No. 5, 2015, hlm. 977-989.

²⁹ Kuan-Ying Hsieh, *et al.*, "Relationship Between Self-Identity Confusion and Internet Addiction Among College Students: The Mediating Effects of Psychological Inflexibility and Experiential Avoidance," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 16, No. 17, 2019, hlm. 3225.

³⁰ Seth J. Schwartz *et al.*, "Identity in Young Adulthood: Links with Mental Health and Risky Behavior," *Journal of Applied Developmental Psychology*, Vol. 36, No.1, hlm. 39-52.

termasuk hak-hak hukum, kesehatan mental, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mengurangi ambiguitas dalam identitas dan memastikan bahwa setiap individu dapat diidentifikasi dengan jelas dalam sistem hukum dan sosial. Ketidakjelasan dalam identitas dapat memperburuk masalah ini, menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak-hak individu di dunia yang semakin terhubung secara digital. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki nama dan identitas yang jelas dan sah dalam dokumen resmi untuk melindungi hak-hak hukum mereka.

Referensi yang relevan mendukung hal ini adalah penelitian yang menyoroti pentingnya dokumentasi status legal dan identitas. Penelitian oleh Budiarti menyoroti bahwa tujuan utama dokumen resmi adalah untuk menetapkan identitas legal seseorang, sering kali ditunjukkan melalui dokumen legal seperti akta kelahiran.³¹ Dalam konteks yang lebih luas, penelitian oleh Ezer *et al.* menunjukkan bahwa kerangka hukum memiliki potensi untuk mengatasi pelanggaran terkait identitas dan hak asasi manusia, sementara layanan advokasi hukum menawarkan sarana untuk penegakan hak-hak tersebut. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa identitas dalam dokumen resmi dijelaskan secara jelas untuk mencegah ambiguitas yang dapat mengganggu proses administrasi hukum dan hak-hak individu.³²

b. Implikasi Pada Hak-Hak Hukum

Pengakuan hukum atas identitas bukan hanya masalah kebutuhan prosedural tetapi juga aspek fundamental hak asasi manusia, karena memvalidasi

³¹ Rizqi Putri Nourma Budiarti *et al.*, "Implementation of Big Data Information System Using Open-Source Metabase for Civil Registration and Vital Statistics Data Visualization in Surabaya", *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, Vol. 7, No. 4, 2023, hlm. 2358.

³² Tamar Ezer, Alpha Abdikeeva, and Martin McKee, "Legal Advocacy as a Tool to Advance Roma Health," *Health Economics, Policy and Law*, Vol 13, No. 1, 2018, hlm. 92–105.

universalitas dan keunikan individu.³³ Selain itu, metode modern yang mengaitkan pengidentifikasi perangkat elektronik dengan informasi identifikasi pribadi menawarkan lapisan keamanan lain, memastikan bahwa identitas dikonfirmasi melalui beberapa saluran. Dengan menggunakan sistem verifikasi canggih ini, lembaga hukum dapat lebih menegakkan hak-hak individu, sehingga mencegah keraguan dan perselisihan yang dapat membahayakan pihak-pihak yang berhak.

Pendekatan komprehensif untuk verifikasi identitas ini sangat penting dalam menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dilindungi tanpa ambiguitas. Referensi yang relevan untuk mendukung hal ini adalah penelitian oleh Putri *et al.* yang menyoroti bahwa dalam konteks peralihan harta bersama, persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri) diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta bersama. Ketidakjelasan identitas atau ketidakpastian persetujuan dalam hal ini dapat berdampak pada validitas transaksi hukum yang dilakukan.³⁴

Penelitian oleh Permadi membahas peralihan hak atas tanah warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama, menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terkait isu hukum ini dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Hal ini menunjukkan kompleksitas yang dapat timbul dalam penentuan hak-hak atas tanah ketika identitas dan persetujuan tidak jelas.³⁵ Dengan demikian, kejelasan identitas individu dalam konteks hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan

Costas Douzinas, "Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us About Human Rights?", *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 3, 2002, hlm. 379–405.

³⁴ Agustina Dewi Putri, Darmawan Darmawan, and Teuku Muttaqin Mansur, "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 81–94.

³⁵ Iwan Permadi, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 149.

hak-hak hukum yang tepat dan mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang berhak.

Kejelasan identitas individu dalam konteks hukum adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak hukum yang tepat. Identitas yang jelas membantu mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang berhak. Dalam konteks ini, teknologi modern seperti *blockchain* dan *distributed ledger* dapat berperan penting dalam verifikasi identitas. Teknologi ini menawarkan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi, yang sangat diperlukan dalam proses hukum dan administrasi. Sebagai contoh, penggunaan teknologi biometrik dalam manajemen identitas telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi pemerintahan dan penegakan hukum, yang menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan keandalan sistem identitas.³⁶

Reformasi dalam sistem hukum dan administrasi juga sangat diperlukan untuk mengadopsi teknologi ini. Identitas digital, sebagai konsep hukum internasional yang berkembang, telah mengubah cara pemerintah, bisnis, dan individu dikenali dan bertransaksi.³⁷ Dengan semakin banyaknya negara yang beralih ke platform digital, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Hal ini tidak hanya mencakup pengembangan teknologi, tetapi juga memerlukan perubahan dalam kebijakan dan praktik hukum untuk mengakomodasi identitas digital dan memastikan perlindungan hak-hak individu di era digital.³⁸

Lebih lanjut, penerapan teknologi seperti *blockchain* dalam verifikasi identitas dapat mempercepat penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan hak-hak individu. Dengan mencatat setiap perubahan atau pengesahan identitas secara

³⁶ Adel Ismail Al-Alawi, Raced Khalid E. Al-Faresi, and Refaat H. Abdel-Razek, "Evaluating the Effectiveness of Biometric Technologies in Controlling the Border Ports of the State of Kuwait", *Journal of E-Government Studies and Best Practices*, 2016, hlm. 1335-1352.

³⁷ Clare Sullivan, "Digital Identity as an International Legal Concept – New Disturbing Developments", *Georgetown Journal of International Affairs*, Vol. 24, No.1, 2023, hlm. 29-35.

³⁸ *Ibid.*

transparan dan tidak dapat diubah, teknologi ini dapat meningkatkan keandalan dan keamanan dalam proses verifikasi identitas.³⁹ Ini sangat relevan dalam konteks hukum yang sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan keakuratan dan keandalan data identitas individu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak sipil dan sosial.

c. Proses Administrasi dan Hukum

Ketidakjelasan identitas individu dalam dokumen resmi memang dapat berdampak pada proses administrasi dan hukum, berpotensi memerlukan verifikasi atau revisi tambahan untuk menjaga akurasi dan konsistensi. Ambiguitas ini dapat menyebabkan penundaan, meningkatkan beban birokrasi, dan menghambat penyelesaian kasus-kasus mengenai hak hukum seperti hak warisan atau hak kepemilikan.⁴⁰ Penelitian yang mendukung hal ini adalah penelitian oleh Aaron K Massey, yang menyoroti bahwa adanya ambiguitas dalam teks hukum dapat membuat perbedaan antara kepatuhan dan pelanggaran terhadap persyaratan hukum. Dalam konteks ini, kejelasan identitas dalam dokumen resmi menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku.⁴¹

Selain itu Beduschi membahas tantangan kontemporer terkait identitas digital dan dampaknya terhadap perlindungan data, privasi, dan hak-hak non-diskriminasi. Identitas digital yang memanfaatkan data pribadi untuk identifikasi dan verifikasi identitas juga berdampak pada hak privasi dan perlindungan data.⁴²

Dalam konteks administrasi dan hukum, kejelasan identitas sangat penting untuk mencegah ambiguitas yang dapat mengganggu efisiensi, kecepatan, dan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Анатолий Осадчий, "Digitalization of Administrative Procedures", *Problems of Legality*, No. 163, 2023, hlm. 229-247.

⁴¹ Aaron K Massey *et al.*, "Identifying and Classifying Ambiguity for Regulatory Requirements," in *2014 IEEE 22nd International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, 2014, hlm. 83-92.

⁴² Ana Beduschi, "Digital Identity: Contemporary Challenges for Data Protection, Privacy and Non-Discrimination Rights", *Big Data & Society*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 1-6.

kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Salah satu solusi yang semakin banyak dibahas adalah penerapan teknologi berbasis digital, seperti *blockchain*, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. menunjukkan bahwa penerapan teknologi *blockchain* dalam operasi pengadilan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas.⁴³ Selain itu, mengusulkan arsitektur otomatisasi verifikasi dan validasi e-sertifikat berbasis *blockchain* yang dapat membantu menghindari pemalsuan aset digital, yang pada gilirannya dapat mempercepat transformasi digital.

Implementasi teknologi ini tidak hanya berpotensi mempercepat proses administratif tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi. Dalam konteks ini, pendekatan yang menggabungkan teknologi enkripsi yang kuat dengan *blockchain* dapat memberikan keamanan tambahan. Misalnya, membahas sistem keadilan berbasis *blockchain* yang mengintegrasikan teknik privasi untuk melindungi data sensitif, sambil memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses hukum.⁴⁴ Dengan demikian, penggunaan teknologi ini dapat mengurangi risiko kebocoran data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Lebih lanjut, inovasi dalam teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. menekankan pentingnya transparansi dalam pengolahan data di bawah regulasi perlindungan data, yang juga relevan dalam konteks penggunaan AI dan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan hukum.⁴⁵ Dengan menerapkan prinsip "*transparency by design*," sistem hukum dapat

⁴³ Dinesh Kumar, Sunil Kumar, and Akashdeep Joshi, "Assessing the Viability of Blockchain Technology for Enhancing Court Operations", *International Journal of Law and Management*, Vol 65, No. 5, 2023, hlm. 425-439.

⁴⁴ Konstantinos Demertzis, "A Secure and Privacy-Preserving Blockchain-Based XAI-Justice System", *Information*, Vol. 14, No.9, 2023, hlm. 477.

⁴⁵ Heike Felzmann *et al.*, "Transparency You Can Trust: Transparency Requirements for Artificial Intelligence Between Legal Norms and Contextual Concerns", *Big Data & Society*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 1-14.

dirancang untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil oleh algoritma dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan transparan.

Secara keseluruhan, penerapan teknologi digital seperti *blockchain* dan sistem enkripsi yang kuat dalam administrasi dan hukum tidak hanya dapat mengurangi ambiguitas tetapi juga meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penting bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan integrasi teknologi ini dalam proses hukum dan administratif untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan.

d. Solusi dan Implementasi

Untuk mengatasi masalah ketidakjelasan identitas dalam proses administrasi dan hukum, beberapa solusi dan implementasi dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan metode *Business Process Reengineering* (BPR) untuk memperbaiki alur kerja administrasi guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses. Selain itu, penggunaan teknologi seperti algoritma tanda tangan digital, seperti yang dibahas oleh Wellem *et al.* dapat membantu memastikan integritas dokumen dan kejelasan identitas. Algoritma tanda tangan digital, seperti *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* (ECDSA), dapat digunakan untuk otentikasi dokumen secara digital.⁴⁷

Penerapan teknologi tanda tangan digital juga dapat dikombinasikan dengan keahlian ahli bahasa forensik untuk memeriksa dokumen secara linguistik, sehingga

⁴⁶ Heike Felzmann *et al.*, "Towards Transparency by Design for Artificial Intelligence", *Science and Engineering Ethics*, Vol. 26, No. 6, 2020, hlm. 3333–3361.

⁴⁷ Theophilus Wellem, Yessica Nataliani, and Ade Iriani, "Academic Document Authentication Using Elliptic Curve Digital Signature Algorithm and QR Code", *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 667.

memastikan keaslian dan keakuratan dokumen.⁴⁸ Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa teknologi tanda tangan digital, seperti yang digunakan dalam penandatanganan kontrak berbasis teknologi tanda tangan elektronik, dapat mencegah pemalsuan tanda tangan elektronik dan segel elektronik dalam kontrak elektronik.

Dalam konteks hukum, tanda tangan digital memiliki peran penting dalam validitas kontrak dalam e-commerce.⁴⁹ Penelitian juga bertujuan untuk menyelidiki validitas tanda tangan digital dan nilai bukti yang terkandung di dalamnya.⁵⁰ Dengan demikian, penerapan tanda tangan digital dalam dokumen formal akademik juga dapat membantu memastikan keabsahan dokumen tersebut.⁵¹ Dengan demikian, integrasi metode BPR, teknologi tanda tangan digital, dan keahlian ahli bahasa forensik dapat memberikan solusi yang komprehensif dalam mengatasi masalah ketidakjelasan identitas, memastikan keakuratan dokumen, serta melindungi hak-hak hukum individu dalam proses administrasi dan hukum.

Pengembangan regulasi yang lebih kuat terkait identitas digital dan dokumen elektronik merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan administrasi modern. Kebijakan keamanan siber yang komprehensif dan standar internasional untuk tanda tangan digital sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen digital serta memastikan perlindungan data pribadi yang lebih baik. Dalam konteks ini, regulasi eIDAS (*electronic IDentification, Authentication and trust*

⁴⁸ Hendrokumoro Hendrokumoro *et al.*, “Peran Linguistik Forensik Pada Era Perkembangan Teknologi Komunikasi”, *Bakti Budaya*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 81.

⁴⁹ Hetty Hasanah and Eman Suparman, “Legal Aspects of the Digital Signature in E-Commerce Connected to Law Number 19 Year 2016 about Amendments to Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions”, in *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities – Humanities and Social Sciences Track (ICOBEST-HSS 2019)*, Paris, France: Atlantis Press, 2020, hlm. 56-59.

⁵⁰ Desak Ayu Intan Diah Iswari and Dewa Gede Rudy, “EXAMINING THE LEGAL STANDING OF DIGITAL SIGNATURES UNDER CIVIL AND ITE LAWS”, *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 142–54.

⁵¹ Henderi Henderi, Devi Rositawati, and Pipin Romansyah, “Model Digital Signature Pada Dokumen Formal Akademik”, *CICES*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 22–32.

Services) di Uni Eropa telah menjadi model yang signifikan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pengakuan timbal balik identitas elektronik di seluruh negara anggota, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital.⁵² Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pengguna dapat merasa lebih aman dalam menggunakan identitas digital mereka.

Kombinasi dari pendekatan teknis, keahlian forensik, dan regulasi yang kuat akan menciptakan ekosistem hukum yang lebih terintegrasi dan efisien. Misalnya, penerapan tanda tangan digital yang sesuai dengan standar internasional, seperti *Digital Signature Standard* (DSS), dapat memberikan jaminan validitas dan keandalan dokumen elektronik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan tanda tangan digital yang kuat dapat mengurangi risiko pemalsuan dan meningkatkan integritas dokumen.⁵³ Selain itu, integrasi identitas digital dengan teknologi *blockchain* dapat memberikan lapisan keamanan tambahan, memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali lebih besar atas data pribadi mereka.

Implementasi solusi ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum dan administrasi secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan teknologi yang tepat, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pertimbangan Hakim dan Keputusan Pengadilan

Pertimbangan Hakim dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek penting terkait identitas Pemohon I, yang awalnya bernama "Sabar" dan

⁵² László Török, "The Relationship Between Digital Development and Economic Growth in the European Union", *International Review of Applied Sciences and Engineering*, Vol.15, No.3, 2024, hlm. 375-389.

⁵³ Tuan Nguyen Kim, Duy Ho Ngoc, and Nikolay A. Moldovyan, "Constructing Representative Collective Signature Protocols Using the GOST R34.10-1994 Standard", *Computers Materials & Continua*, Vol. 75, No.1, 2023, hlm. 1475-1491.

kemudian menambahkan nama "Widodo" menjadi "Sabar Widodo" atas saran orang tuanya untuk menghindari penyakit. Nama "Sabar Widodo" telah digunakan secara resmi dalam berbagai dokumen, termasuk saat Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam sidang, saksi-saksi yang dihadirkan mengonfirmasi bahwa "Sabar" dan "Sabar Widodo" adalah orang yang sama, dan bukti dokumen seperti akta kelahiran, akta nikah, serta dokumen identitas lainnya memperkuat kesaksian tersebut. Pertimbangan utama hakim adalah untuk memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi Pemohon II, Widani Safitri, anak Pemohon I, sehingga tidak ada kebingungan atau masalah hukum di masa depan terkait perbedaan nama orang tuanya. Hakim juga merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutuskan perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut, menetapkan bahwa "Sabar" dan "Sabar Widodo" adalah orang yang sama dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon II.⁵⁴

Keputusan Pengadilan yang mengesahkan bahwa Sabar dan Sabar Widodo adalah identitas dari orang yang sama merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi ambiguitas. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, yang memungkinkan pengadilan untuk memutuskan dengan yakin bahwa kedua identitas tersebut merujuk pada individu yang sama. Referensi oleh Hanafiah membahas penerapan akuntansi forensik dalam tindak pidana korupsi, yang menekankan pentingnya bukti yang memadai dalam pengambilan

⁵⁴ Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 43/Pdt.P/2024/PN.Tmg, hlm.1-12.

keputusan di pengadilan.⁵⁵ Dengan demikian, keputusan Pengadilan yang mengesahkan identitas Sabar dan Sabar Widodo sebagai orang yang sama merupakan langkah yang penting dalam menegakkan kepastian hukum dan menghindari ambiguitas, dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan proses pengambilan keputusan yang cermat.

Keputusan Pengadilan yang mengesahkan identitas Sabar dan Sabar Widodo sebagai orang yang sama merupakan langkah penting dalam menegakkan kepastian hukum dan menghindari ambiguitas. Keputusan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan proses pengambilan keputusan yang cermat, yang mencerminkan peran pengadilan sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjaga tertib administrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat. Dalam konteks ini, Qalsum dan Wibowo menekankan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah kunci untuk memastikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang efektif, yang menunjukkan bahwa keputusan hukum harus diimplementasikan dengan baik untuk mencapai keadilan.⁵⁶

Lebih lanjut, keputusan ini juga mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam sistem hukum yang harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang. Hal ini sejalan dengan pandangan Jaelani dan Ufran yang menyatakan bahwa penguatan hak milik atas tanah harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada, sehingga keputusan pengadilan dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat.⁵⁷ Dalam hal ini, pengadilan berperan penting dalam

⁵⁵ Azkia Nurul Mufti Nur Hanafiah, Dea Saliha Rizka, and Pupung Purnamasari, "Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 105–113,

⁵⁶ Umi Qalsum and Agung Wibowo, "Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No.1, 2023, hlm. 87–95.

⁵⁷ Rian Topan Jaelani and Ufran Ufran, "Penguatan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mataram)", *Indonesia Berdaya*, Vol.4, No. 2, 2023, hlm. 441-446.

menyesuaikan hukum dengan realitas sosial, termasuk dalam hal perubahan identitas yang terjadi akibat faktor tradisi atau kepercayaan keluarga.

Keputusan yang diambil oleh pengadilan juga menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks yang lebih luas. Menurut M. Aksan, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat, sehingga penting bagi pengadilan untuk bertindak tegas dalam menegakkan keputusan mereka.⁵⁸ Dengan demikian, keputusan yang mengesahkan identitas Sabar dan Sabar Widodo tidak hanya penting untuk individu tersebut, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan identitas hukum dalam dokumen resmi, khususnya dalam menghindari ambiguitas yang dapat menghambat proses administrasi dan hukum. Kasus Sabar dan Sabar Widodo menunjukkan bagaimana ketidakjelasan identitas dapat memengaruhi validitas hak-hak hukum, termasuk hak waris dan administrasi terkait. Keputusan pengadilan yang mengesahkan bahwa "Sabar" dan "Sabar Widodo" merujuk pada individu yang sama mencerminkan perlunya sistem hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya.

Penggunaan teknologi modern seperti tanda tangan digital serta keahlian ahli bahasa forensik dalam verifikasi identitas juga terbukti efektif dalam memastikan integritas dokumen hukum. Pengadilan memainkan peran penting tidak hanya dalam

⁵⁸ Muhamad Aksan Akbar, "Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa", *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 571-586.

menegakkan hukum tetapi juga dalam menjaga tertib administrasi, melindungi hak-hak hukum individu, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi regulasi yang lebih kuat dan pemanfaatan teknologi canggih sangat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Sistem hukum yang adaptif dan berbasis teknologi akan mampu mengurangi potensi sengketa di masa depan, meningkatkan efisiensi proses hukum, dan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Akbar, Muhamad Aksan, “Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengaduan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa”, *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Al-Alawi, Adel Ismail, Raeed Khalid E. Al-Faresi, dan Refaat H. Abdel-Razek, “Evaluating the Effectiveness of Biometric Technologies in Controlling the Border Ports of the State of Kuwait”, *Journal of E-Government Studies and Best Practices*, 2016.
- Arifin, Jaenal dan Muhammad Zidny Naf’an, “Verifikasi Tanda Tangan Asli Atau Palsu Berdasarkan Sifat Keacakan (Entropi)”, *Jurnal Infotel*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Arisandi, Diki, Moh Baharudin Yusuf, dan Sukri Sukri, “Pemeriksaan Integritas Dokumen Dengan Digital Signature Algorithm”, *JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering)*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Beduschi, Ana, “Digital Identity: Contemporary Challenges for Data Protection, Privacy and Non-Discrimination Rights”, *Big Data & Society*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Budiarti, Rizqi Putri Nourma, *et al.*, “Implementation of Big Data Information System Using Open-Source Metabase for Civil Registration and Vital Statistics Data Visualization in Surabaya”, *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, Vol. 7, No. 4, 2023.

